

Peran Tata Kelola Sektor Publik Dalam Mendukung Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah

Chriswia Dwi Rani Pinem¹, Difa Al Humaira Parinduri², Fatma Khairiah Lubis³, Rosa Elfrida Sitompul⁴, Zulfa Afiati⁵
^{1,2,3,4,5} Universitas Sumatera Utara

Abstract. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal, didukung oleh prinsip otonomi daerah yang memberikan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan setempat. Dalam konteks kebijakan publik, manajemen sumber daya manusia yang berkualitas dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola sektor publik yang baik menjadi krusial untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, responsif, dan profesionalitas menjadi landasan dalam memastikan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Kesimpulannya, penekanan pada prinsip-prinsip good governance diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kebijakan publik yang berdaya guna dan berdampak positif bagi masyarakat setempat.

Kata kunci: Efektivitas, Good Governance, Kebijakan Publik

1. Pendahuluan

Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal, serta bertugas merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia pada pasal 18 ayat 2 yang berisi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asa otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola potensi daerahnya sendiri. Berdasarkan kebijakan yang mengatur otonomi daerah pada pasal 1 angka 6 UU 23/2014 yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai (Hidayat, 1986:41). Menurut Thomas R Dye kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Dalam menjalankan kebijakan publik tidak lepas dari peran tata kelola sektor publik yang baik (good governance). Tata kelola sektor publik adalah seperangkat ketentuan, baik yang bersifat formal maupun informal yang menentukan proses pengambilan keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan kebutuhan publik, dengan tujuan untuk memelihara nilai-nilai konstitusional sebuah negara dalam menghadapi berbagai perubahan dalam permasalahan serta lingkungan sosial ekonomi global (OECD, 2011) yang mana hal ini diharapkan membantu mengintegrasikan peran pemerintah, agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien sesuai dengan prinsip good governance. Adapun prinsip tata kelola sektor publik yang baik mencakup beberapa aspek seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, koordinasi antar instansi, serta efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat meningkatkan kualitas perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik oleh pemerintah.

2. Hasil dan Pembahasan

Peranan Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Kebijakan Publik

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan berbagai fungsi untuk melayani, membangun, dan memberdayakan masyarakat di tingkat lokal. Peran ini semakin penting dengan adanya otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pasal 18 ayat 2, disebutkan dengan jelas bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang besar untuk mengelola dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan pengertian otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi daerahnya, baik dalam hal sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun budaya dan kearifan lokal. Pemerintah daerah dapat merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat di daerahnya masing-masing. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah juga diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat. Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah dapat merancang program-program pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, dengan otonomi daerah, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam memberdayakan masyarakat di wilayahnya. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, seperti program pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta peningkatan akses terhadap sumber daya dan informasi. Dengan demikian, peran pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar untuk mengoptimalkan potensi daerahnya dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Manajemen Sumber Daya Manusia di Sektor Publik juga mendukung efektifitas kebijakan publik. Kualitas dan kompetensi pegawai pemerintah daerah merupakan faktor kunci dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan publik. Pemerintah daerah perlu memastikan pegawainya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dapat dicapai melalui proses rekrutmen yang selektif, program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur, serta penilaian kinerja yang objektif. Pemerintah daerah juga dapat meningkatkan kompetensi pegawai dengan memperkuat budaya belajar dan berbagi pengetahuan di lingkungan kerja.

Dalam sistem manajemen sumber daya manusia, pemerintah daerah harus menerapkan prinsip merit, yaitu mengedepankan kualifikasi, kompetensi, dan prestasi calon pegawai. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem karir pegawai yang jelas, dengan adanya program pengembangan kompetensi, rotasi jabatan, dan promosi yang transparan. Upaya retensi pegawai juga penting dilakukan, dengan memberikan remunerasi yang kompetitif, lingkungan kerja yang kondusif, dan kesempatan pengembangan diri yang memadai.

Penerapan prinsip merit dalam manajemen sumber daya manusia dapat meningkatkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas pegawai pemerintah daerah. Hal ini dapat diwujudkan melalui sistem rekrutmen terbuka, penilaian kinerja yang objektif, serta promosi dan mutasi pegawai yang transparan dan adil. Dengan demikian, manajemen sumber daya manusia yang berbasis prinsip merit akan mendukung terbentuknya birokrasi yang kompeten dan berorientasi pada pelayanan publik yang efektif.

Efektivitas Penerapan Kebijakan Publik oleh Pemerintah Daerah

Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil dari suatu program dalam mencapai tujuannya. Keberhasilan suatu program dapat dinilai dari sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat tercapai dalam batas waktu yang ditentukan, tanpa memandang besarnya biaya yang dikeluarkan. Viabilitas digunakan sebagai alat ukur untuk membandingkan rencana dengan hasil yang diperoleh, yang membantu dalam menentukan apakah suatu program atau tindakan dapat dianggap berhasil atau

tidak. Efektivitas juga dapat dilihat sebagai kemampuan untuk memberikan pelayanan yang bermanfaat kepada orang lain atau organisasi yang menggunakan hasil produk tersebut. Ini melibatkan penggunaan sumber daya, sarana, dan prasarana yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan efektivitas diukur dari seberapa dekat hasil kegiatan dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin mendekati sasaran, semakin tinggi efektivitasnya. Ada juga pandangan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas atau fungsi suatu organisasi atau kegiatan tanpa tekanan atau ketegangan yang signifikan di antara pelaksanaannya. Secara umum, efektivitas menunjukkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam jumlah, kualitas, dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Good Governance adalah suatu sistem pengaturan pemerintahan negara yang kuat, berperhatian, produktif, dan membangun hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara negara, sektor ekspres, area rahasia, dan masyarakat. Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa Good Governance merupakan pendekatan yang berfokus pada pengembangan sektor publik oleh pemerintah yang baik. Sedermayanti (2003) menambahkan bahwa Good Governance melibatkan manajemen pembangunan yang solid, bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip demokrasi dan efisiensi pasar, serta menghindari korupsi baik secara politik maupun administratif, disiplin anggaran, dan menciptakan kerangka hukum dan politik untuk mendorong kegiatan wirausaha. Tujuan dari Good Governance adalah menciptakan kondisi pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang seimbang dengan melibatkan kerjasama antara negara, masyarakat madani, dan sektor swasta. Sinambela (2008) menekankan bahwa kualitas Good Governance dapat terwujud jika pemerintah dan instansi publik bersikap terbuka terhadap ide-ide baru dan responsif terhadap kepentingan masyarakat, yang dapat ditingkatkan dengan memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat mengenai proses dan implementasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Good Governance merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid, bertanggung jawab, efisien, dan efektif, dengan menjaga sinergi antara berbagai sumber daya dalam negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Robert Eyestone, seperti yang dikutip oleh Leo Agustino (2008: 6), mendefinisikan kebijakan publik sebagai "interaksi antara unit pemerintah dan lingkungannya". James E. Anderson, seperti yang dikutip oleh Islamy (2009: 17), menjelaskan bahwa kebijakan adalah "serangkaian tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok pelaku dengan tujuan tertentu untuk menangani suatu masalah atau permasalahan tertentu". Dengan merujuk pada definisi para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah "rangkaian keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat".

Dalam kebijakan publik koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan juga diperlukan demi menunjang keefektifan. Seperti hal-hal berikut:

- Peran pemerintah pusat dalam mendukung tata kelola daerah. Menetapkan kerangka kebijakan dan regulasi yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif. Menyediakan dukungan teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja tata kelolanya. Serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola daerah, serta memberikan panduan dan umpan balik untuk perbaikan yang berkelanjutan.
- Mekanisme penyelesaian konflik antar pemangku kepentingan. Mengembangkan mekanisme resolusi konflik yang adil dan transparan untuk menangani perbedaan kepentingan di antara pemangku kepentingan. Memfasilitasi dialog dan negosiasi konstruktif untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Melibatkan pihak ketiga yang netral, jika diperlukan, untuk membantu proses mediasi dan arbitrase.
- Sinergi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Perlunya membangun kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Mekanisme yang efektif untuk berbagi informasi, sumber daya, dan tanggung jawab di antara ketiga kelompok pemangku kepentingan ini. Memastikan kepentingan dan aspirasi berbagai pihak terwakili dalam proses pengambilan keputusan.

Pemerintah daerah perlu menyediakan berbagai saluran dan mekanisme yang memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam proses kebijakan. Saluran tersebut dapat berupa konsultasi publik,

dengar pendapat, forum musyawarah warga, hingga proses pelibatan masyarakat secara daring. Mekanisme partisipasi harus dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat tersampaikan dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Organisasi masyarakat memiliki peran penting dalam memantau dan mengawal proses kebijakan publik. Organisasi ini dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, menyuatkan kepentingan warga, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses kebijakan. Selain itu, juga dapat berperan dalam mendorong perbaikan kualitas kebijakan melalui analisis kritis, advokasi, dan pengawasan. Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat akan meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan publik.

Dalam menjalankan kebijakan publik, pemerintah daerah tidak lepas dari peran tata kelola sektor publik yang baik (*good governance*). Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dapat meningkatkan kualitas perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik oleh pemerintah daerah. Hal ini diharapkan dapat mendorong efektivitas pelaksanaan kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Adapun prinsip-prinsip tata kelola sektor publik ialah :

- **Transparansi**

Keterbukaan yang dilakukan oleh pihak perumus kebijakan akan membawa dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan. Dengan adanya ketransparanan, para pengambil kebijakan akan lebih bertanggung jawab dan dapat diawasi, sehingga akan memungkinkan kontrol yang efektif dari masyarakat terhadap pejabat yang memiliki kewenangan dalam pembuatan kebijakan..

- **Akuntabel**

Akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban pihak yang memiliki wewenang atas segala keputusan dan tindakan yang diambilnya kepada publik. Adanya pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mencegah tumpang tindih dan menghindari kesalahpahaman. Terdapat tolok ukur yang jelas dan terukur untuk menilai kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Standar ini menjadi dasar bagi pertanggungjawaban. Pemerintah secara rutin menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada publik. Hal ini memungkinkan pengawasan dan penilaian oleh masyarakat. Adanya mekanisme pengawasan yang memadai, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan tugasnya. Terdapat konsekuensi yang jelas, baik berupa sanksi maupun insentif, sebagai wujud pertanggungjawaban atas hasil kinerja pemerintah. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara bertanggung jawab.

- **Efisien**

Efisien berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip efisien menekankan pada penggunaan sumber daya yang terbatas, seperti waktu, tenaga, dan biaya, dengan cara yang paling efektif dan hemat. Dalam konteks manajemen, efisiensi sering kali terkait dengan peningkatan produktivitas dan pengurangan pemborosan. Contoh penerapan prinsip efisien seperti pemasaran digital, dengan menerapkan strategi pemasaran online yang efektif seperti kampanye iklan yang terukur, pemanfaatan media sosial secara efisien, dan analisis hasil untuk mengoptimalkan kinerja kampanye.

- **Efektif**

Efektif berkaitan dengan kemampuan mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Dalam konteks manajemen, efektivitas berarti mencapai tujuan organisasi atau individu dengan cara yang tepat dan efisien. Prinsip efektif menekankan pada pencapaian hasil yang diharapkan tanpa mempedulikan biaya yang telah atau harus dikeluarkan. Contohnya seperti pelayanan pelanggan yang mengimplementasikan sistem yang efektif dalam menanggapi keluhan pelanggan serta memberikan solusi yang tepat dalam waktu yang singkat.

- **Responsif**

Prinsip responsibilitas merupakan prinsip dimana pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar. Pemerintah harus responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mampu merespons dengan cepat terhadap perubahan dan tantangan yang terjadi. Aspek responsif dalam good governance bermaksud untuk mendorong badan-badan publik untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat. Dalam paradigma New Public Administration, suatu paradigma yang dikembangkan oleh George Frederickson, menjelaskan bahwa salah satu nilai yang perlu dimiliki oleh badan publik di masa yang akan datang adalah terkait dengan daya tanggap. Badan publik perlu memiliki daya tanggap yang baik dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman dan juga kebutuhan masyarakat terkait kehadiran pemerintah. Kebutuhan akan daya tanggap sebagai jawaban atas permasalahan lambannya badan publik dalam menempatkan diri pada perkembangan serta tuntutan masyarakat.

- **Profesionalitas**

Profesionalisme berarti tanggung jawab atas profesi. Tindakan profesionalitas tercermin dari kemampuan individu atau kelompok dalam mempertanggungjawabkan profesi mereka. Ini meliputi mengerjakan tugas dengan baik, menjaga rahasia, beretika, terus belajar, dan berkontribusi pada masyarakat. Ini penting untuk individu dan organisasi profesi untuk membangun kepercayaan publik. Dalam konteks yang lebih luas, sejumlah aspek penting lainnya juga dapat menjadi fokus dalam penyempurnaan konsep tata kelola sektor publik. Misalnya, pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi yang inklusif dan transparan dari masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan publik dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak tercermin dalam keputusan yang diambil. Selain itu, isu keberlanjutan juga menjadi hal yang semakin penting dalam konteks tata kelola sektor publik. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan dan tindakan mereka terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah daerah juga dapat memperhatikan pentingnya inovasi dan adaptabilitas. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kemajuan teknologi dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Melalui prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Dalam menjalankan kebijakan publik, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan kewenangan politik, tetapi juga membutuhkan manajemen sumber daya manusia yang baik. Kualitas dan kompetensi pegawai pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan publik. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip tata kelola sektor publik yang baik (good governance) juga menjadi hal yang penting dalam meningkatkan kualitas perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik oleh pemerintah daerah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, responsif, dan profesionalitas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, diharapkan pemerintah daerah dapat menciptakan kondisi pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, efisien, dan efektif, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.